BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan Narkotika dikategorikan sebagai extraordinary crime, transnational crime dan organized crime. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik, kejahatan melintasi batas negara yang dampak negatif ditimbulkan oleh kejahatan ini sangatlah dahsyat. Untuk itu extraordinary punishment kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambah ke seantero bumi ini sebagai transnational crime. Dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir (*organized crime*) melihat pada sifat kejahatan Narkotika yang melibatkan bentuk organisasi bersifat rahasia dengan sistem terstruktur, hierarki, terencana dan berkelanjutan.¹

Dari tahun ke tahun penikatan kasus narkotika semakin bertambah, sehingga banyak membuat masyarakat menjadi resah. Narkotika sendiri merupakan adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

¹ Zainab Ompu Jainah, 2013, "Kejahatan Narkotika Sebagai Fenomena dari Transnational Organized Crime", *Pranata Hukum*, Volume 8, Nomor 2, Juli 2013, hlm. 96

dibedakan ke golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang².

Narkotika merupakan obat atau bahan yang dapat digunakan di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Maka dari itu narkotika dilarang keras untuk beredar bebas di masyarakat. Sehingga di atur tersendiri dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain Undang-undang tersebut terdapat juga Peraturan yang mendukung guna memberantas narkotika antara lain Peraturan Menteri Kesehatan No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Namun dengan adanya Undang-undang tersebut tidak menjamin masyarakat dapat terbebas dari narkotika. Banyak cara diluncurkan oleh para peredar narkotika dalam melakukan peredaran gelap narkotika. Dengan iming-iming bayaran yang besar akhirnya terjerumus dalam peredaran gelap narkotika. Peredaran Gelap Narkotika itu sendiri adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika³. Sehingga sangat dimungkinkan adanya penyalahguna narkotika dalam Undang-undang No.35

² Direktorat Diseminasi Informasi, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2012, *Pencegahan penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hlm.2.

³ Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tahun 2009 Tentang Narkotika Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

D.I Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar, kota wisata dan kota budaya yang memiliki potensi terjadinya penyalahguna dan pengedaran gelap narkotika. Hal tersebut didukung dengan adanya data yang penulis peroleh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat BNNP DIY pada tahun 2022 mencatat adanya 153 Total Kasus Narkoba, 198 Total Tersangka Kasus Narkoba, dan 265 Total Pasien Penyalahguna⁴.

Narkotika sudah memakan banyak korban dari berbagai kalangan tidak hanya orang dewasa saja bahkan anak-anak pun menjadi korban narkotika. Tentunya dalam penerapan hukum terhadap orang dewasa dan anak yang menjadi korban penyalahguna narkotika sangatlah berbeda dari segi emosional, anak mempunyai tingkat emosional yang tidak stabil dibandingkan orang dewasa dalam menghadapi masalah. Sehingga anak diberikan perhatian khusus oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah hukum seperti dituangkan dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Yang dimaksud Anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ialah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁵

⁴ Data Statistik Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta <https://yogyakarta.bnn.go.id/>

⁵ UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak

Menurut Nugraha & Handoyo, (2019) mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika diantaranya adalah penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara; pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercayai oleh anak; dan pemberian advokasi sosial⁶.

Maka dari itu dilakukannya Diversi Pengetian Diversi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak berbunyi, “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam Pasal 7 Ayat (2) Diversi dapat dilakukan jika memenuhi syarat antara lain :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Terhadap penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara satu

⁶ Nugraha, W., & Handoyo, S., 2019, “Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan, *Journal e Facto*, 6 (1), hlm 1-20

tahun sampai dengan empat tahun, sehingga dapat dilakukan upaya Diversi pada tingkat penyidikan di BNNP DIY.

Penulis melakukan studi di Badan Narkotika Provinsi D.I Yogyakarta karena BNNP DIY sebagai merupakan salahsatu penegak hukum dalam pemberantas penyalahguna dan peredaran gelap narkotika di D.I Yogyakarta disamping adanya Polri. BNN sendiri mempunyai tugas dalam pecegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Serta mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyidikan terhadap orang yang diduga sebagai penyalahguna atau peredar gelap narkotika.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pelaksanaan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan diversifikasi terhadap tersangka anak penyalahgunaan narkotika dan mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis :

Penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya cara/metode diversifikasi terhadap tersangka anak penyalahgunaan narkoba

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Insitusi Pendidikan

Diharapkan dapat menerapkan dan menjamin upaya penyelesaian terhadap tindakan narkoba sesuai dengan ketentuan dalam pengaturan hukum mengenai Diversi

b. Bagi Praktisi Hukum

Diharapkan agar setiap kasus Narkoba yang dilakukan oleh anak untuk penyelesaiannya diarahkan kepada ketentuan Diversi

E. Keaslian Penulisan

1. Indira Muliani, 150200038, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019, Implementasi Upaya Diversi Pada Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Anak (Studi Di Polrestabes Medan), dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana Perkembangan Pengaturan Diversi di Indonesia?
- b. Bagaimana Implementasi Upaya Diversi di Polrestabes Medan terhadap Tindak Pidana Penyalagunaan Narkoba yang Dilakukan Anak?

- c. Kendala Apa Saja yang Dihadapi Polrestabes Medan dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Bagaimana Upaya Mengatasi Kendala tersebut?

Hasil penelitian yang didapatkan

- a. Perkembangan pengaturan diversi di Indonesia dimulai dengan ide diversi dalam hukum Internasional yang dicanangkan dalam SMRJJ (The Beijing Rules) sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak. Dalam instrumen hukum Nasional, diversi sebelum lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara formal belum ada diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Adapun berbagai peraturan diversi diluar Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, dan Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim Polri

b. Implementasi upaya diversifikasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak di Polrestabes Medan dilakukan oleh penyidik SatRes Narkoba Polrestabes Medan. Yang mana proses pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun mekanisme pelaksanaan diversifikasi terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan anak antara lain: Melayangkan surat ke BAPAS (Balai Pemasyarakatan); Meminta kepada orangtua atau wali anak tersebut daftar riwayat hidup, seperti akta lahir untuk menandakan bahwa anak tersebut masih bersekolah; Pihak penyidik mengundang Dinas Sosial dan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia); Di dalam undangan tersebut ditentukan kapan pelaksanaan kesepakatan diversifikasi dilakukan, yang mana si anak harus didampingi orangtua; Menentukan hari pelaksanaan kesepakatan diversifikasi tersebut; Pelaksanaan kesepakatan diversifikasi. Adapun dalam proses pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan ini, pihak penyidik SatRes Narkoba Polrestabes Medan berpedoman pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak dalam proses pelaksanaannya, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan

Rehabilitasi Sosial untuk menentukan pembedaan terhadap klasifikasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan barang bukti pemakaian satu hari. Adapun implementasi upaya Universitas Sumatera Utara diversi di Polrestabes Medan yang berhasil dilakukan telah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 6/PENT.PID.SusAnak/2018/PN.MDN.

- c. Adapun yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaan diversi di Polrestabes Medan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan adalah:
 - a. kurangnya kepedulian orangtua akan menghambat proses diversi;
 - b. kurangnya kepedulian orangtua juga mempersulit penyidik mendapatkan identitas anak;
 - c. terbatasnya waktu penangkapan terhadap anak guna kepentingan penyidikan;
 - d. ketidakhadiran orangtua;
 - e. jika yang tertangkap adalah anak gelandangan, akan sulit bagi penyidik untuk mendapatkan identitas anak tersebut; kurangnya pemahaman tentang upaya diversi.
2. Gloryus Adventus Mandiangan, 150512049, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dan Penyalahguna Narkoba Golongan 1. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klas 1a Jayapura Nomor : 121/Pid.B/2012/Pn.Jpr), dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika golongan I?
- b. Apa sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika golongan I?

Hasil penelitian didapatkan

- a. Anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkotika pada Putusan Pengadilan dengan Nomor Register Perkara No.121/Pid.B/2012/PN.Jpr berhak mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum yang diberikan bersifat khusus sesuai dengan rumusan Pasal 59 ayat (2) huruf b dan huruf e, yang menjelaskan “Perlindungan Khusus diberikan kepada: anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang terlibat tindak pidana narkotika dalam hal ini sebagai kurir dan penyalahguna narkotika yaitu: a. Rehabilitasi Berdasarkan kasus diatas diketahui bahwa terdakwa selain menjadi kurir/perantara dalam jual beli narkotika terdakwa juga sebagai pengguna narkotika tersebut, untuk itu sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merumuskan, “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, hal ini dimaksudkan agar anak tersebut tidak mengalami

ketergantungan akan narkoba. b. Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak 57 yang menjadi kurir dan penyalahguna narkoba lewat pendekatan restoratif agar tercapainya proses diversi. Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penyelesaian tindak pidana narkoba yang melibatkan anak dalam hal ini sebagai kurir dan penyalahguna narkoba tidak semestinya dilakukan melalui jalur persidangan karena ada alternatif lain yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara anak tersebut yaitu dengan upaya diversi.

- b. Sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir dan penyalahguna narkoba adalah pidana dengan syarat sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan, Pidana pokok bagi anak terdiri atas: 1) Pembinaan di luar lembaga, Bertujuan agar seorang anak dapat mengikuti program terapi untuk menghindarkan anak dari ketergantungan akan narkoba serta anak tersebut dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan bisa dikembalikan ke dalam lingkungan sosialnya secara wajar. 2)

Pelayanan masyarakat, Pelayanan masyarakat ini dimaksudkan untuk membangun nilai positif bagi anak yang melakukan tindak pidana agar lebih peduli akan kegiatan-kegiatan positif yang diselenggarakan oleh masyarakat, tujuannya supaya anak tersebut ketika dalam pergaulan di masyarakat dapat menjalin hubungan baik dengan lingkungan sosialnya serta mendapat hal-hal positif yang dapat ditanamkan di dalam diri anak tersebut. 58 3) Pengawasan. Dalam tahapan menjalani pidana dengan syarat, seorang anak harus diawasi atau berada dalam pengawasan sesuai dengan tempat yang telah memenuhi persyaratan tetap.

3. Muhammad Alvin Khoiru, 10340041, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Yogyakarta Tahun 2014, dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana Penegakan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkotika di Kota Yogyakarta tahun 2014?
- b. Apakah pelaksanaan penjatuhan hukuman terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan UU No. 03 Tahun 1997, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

Hasil penelitian didapatkan

- a. Proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkoba di kota Yogyakarta, mulai dari tahap penyidikan terhadap anak yang telah dewasa. Hal ini Polresta Yogyakarta, memberikan penanganan khusus mulai dari pemeriksaan, dan penempatan ruang pemeriksaan, serta anak-anak yang didampingi oleh orang tua. Agar tidak menimbulkan stigma buruk dan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yang dilindungi. Sehingga sesuai dengan SOP atau buku panduan polisi khusus untuk penanganan anak yang berperkar dan UU No. 03 Tahun 1997, tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak. Penyidik yang menyidik tersangka SLAMIC UNIVERSIT anak terlebih dahulu telah mengikuti pelatihan dalam penanganan anak. Selanjutnya, tingkat proses pemeriksaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Yogyakarta, bersifat tertutup, majelis hakim, JPU, penasehat hukum tidak menggunakan toga. Hak-hak anak terpenuhi seperti dihardiri oleh orang tua/wali, didampingi penasehat hukumnya, pembimbing Klien anak dari BAPAS, sehingga suasana dalam kekeluargaan. vonis hakim tidak terlalu tinggi, dan tempat penahanan anak dibedakan dengan orang dewasa. Proses penahanan dan persidangan yang singkat dan mudah.
- b. Berdasarkan hasil penelitian (wawancara, pengamatan, dan analisis) bahwa tahap demi tahap yang dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum, mulai proses penangkapan, penyidikan,

hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sampai saat ini sudah sesuai dengan UU No. 03 Tahun 1997, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Fakta dipersidangan pun membuktikan bahwa anak yang terbukti melanggar UU No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Adapun persamaan yang terletak pada pembahasan pada subyek yang menjadi pembahasan dalam penelitian yaitu anak yang terjerat penyalahguna narkotika. Letak perbedaannya dalam ketiga skripsi terdapat pada subansi yang menjadi fokus penelitian. Indira Muliani menekankan pada Implementasi Upaya Diversi Pada Tingkat Penyidikan yang dilakukan di Polrestabes Medan. Gloryus Adventus Mandiangan menulis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Dan Penyalahguna Narkotika Golongan 1. Dan Muhammad Alvin Khoiru meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Yogyakarta Tahun 2014 studi Polresta Yogyakarta. Sedangkan penulis ingin menekankan pada penerapan diversi bagi anak yang menjadi tersangka penyalahguna narkotika di BNNPDIY.

F. Batasan Konsep

1. Diversi

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 7 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi yaitu menghindarkan anak dari prosedur reami beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang⁷.

2. Anak

Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menimbang bahwa anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan menurut Undang- Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 Pasal 1 angka 1 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih didalam kandungan.

3. Penyalahguna Narkotika

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya, rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

⁷ Harrys Pratama Teguh, 2018, Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana, C.V Andi Offset, Yogyakarta, hlm.205.

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian yang ketat dan seksama. Sedangkan Penyalahguna dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15 Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini yang terdiri dari :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyeknya, dengan melakukan wawancara Penyidik BNNP DIY

2) Data Sekunder terdiri atas :

a) Bahan hukum primer adalah dokumen yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

(3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(4) Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

(5) Peraturan Presiden Republik Indonesia No.23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional

b) Bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah sebagai berikut :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
- b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi terkait dengan obyek permasalahan yang diteliti, wawancara dilakukan dengan kebijakan peneliti dan kemudian akan diadakan pencatatan atas jawaban. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data guna menunjang penulisan hukum

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Parakan, Kecamatan Mergangsan, Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Narasumber

Narasumber yang dipilih oleh peneliti sebagai data dalam penelitian ini adalah Seto Aji S.Psi., M.H dan Maydina Pratika M. S.H. Penyidik BNNPDIY

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara kualitatif, yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai secara sistematis data-data yang diperoleh dari pengumpulan data, sehingga mendapatkan gambaran suatu keadaan permasalahan hukum yang diteliti dan selanjutnya diuraikan dalam bentuk kesimpulan dengan cara berfikir induktif yaitu cara berfikir dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kepada pengetahuan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran. Pengetahuan khusus dalam hal ini adalah hasil penelitian tentang penerapan diversifikasi terhadap perkara anak penyalahgunaan narkoba di BNNP DIY dan pengetahuan umum mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.